

WACANA *SUBALTERN HISTORY* MELALUI *CRITICAL PEDAGOGY* DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Rikza Fauzan¹, Yuni Maryuni², Agus Rustamana³, Pitria Apriyani⁴
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
SMA Negeri 2 Kota Serang

rikza.fauzan@untirta.ac.id¹, yunimaryuni@untirta.ac.id², agus.rustamana@untirta.ac.id³,
pitriaapriyani04@guru.sma.belajar.id⁴

Abstrak

Kajian ini merupakan studi literatur ilmiah mengenai narasi subaltern dalam pembelajaran sejarah di Indonesia. Konsep subaltern sendiri merupakan salah satu konsep dalam paradigma poskolonial sebagai antitesis historiografi “*grand narrative*”. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan perkembangan subaltern dalam sejarah nasional dan pendekatannya melalui dialog kritis. Metode yang digunakan dalam kajian ini dengan studi literatur dengan mengumpulkan referensi yang relevan dalam menarik kesimpulan. Hasil kajian mendeskripsikan perkembangan narasi subaltern dalam kurikulum pendidikan sejarah di Indonesia. kajian *subaltern history* didasarkan atas beragam narasi (*multiple narratives*) atau sejumlah narasi kecil (*small narrative*) yang bisa dimasukkan dan dikembangkan dalam materi dan pembelajaran sejarah. Urgensi subaltern secara praksis diimplementasikan melalui pedagogi kritis dalam pendidikan sejarah.

Kata kunci: Subaltern, Pedagogi Kritis, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Teori kritis telah memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran dan gerakan sosial. Melalui teori kritis, kita tidak sekadar memahami realitas, tetapi juga mencapai suatu keadilan sosial. Karena dengan teori kritis kita diajak untuk mengkritisi dominasi dan subordinasi, sehingga mendorong perubahan emansipatoris (Cornbleth, 2017) Kemunculannya banyak dipengaruhi oleh konteks historis Revolusi di Eropa, serta gerakan intelektual Eropa, khususnya gagasan Karl Marx. Di abad ke 20, perkembangannya makin pesat seiring dengan gerakan pemikiran Frankfurt sejak 1960-an. Dalam 40 tahun terakhir, terdapat beragam pemikiran yang turut membentuk wajah teori kritis kontemporer, yakni: posmodernisme, poskolonialisme, feminisme, pedagogi kritis, teori ras kritis, serta teori psikoanalisis. (Segall et al., 2018)

Perkembangan yang pesat dalam teori kritis turut memberikan dampak dalam pendidikan sejarah. Dalam perspektif teori kritis, pendidikan sejarah melihat relasi antara politik dan ideologi dalam pembelajaran, bagaimana kekuatan besar berpengaruh di dalam pendidikan dan masa lalu. Pendidikan sejarah juga digunakan sebagai sarana untuk

membongkar hubungan kekuasaan hegemonik yang menindas dan mendorong perubahan menuju dunia yang lebih demokratis dan adil. (Segall et al., 2018) Pendidikan sejarah mendekonstruksi realitas dunia, mengungkap mekanismenya dan konsekuensinya. Dengan demikian, pendidikan sejarah bukan hanya terfokus pada rangkaian peristiwa, melainkan juga melihat apa yang ada di balik peristiwa.

Implikasi dari teori kritis dalam Pendidikan sejarah adalah bahwa proses Pendidikan mencoba untuk mempertanyakan kembali tentang klaim sejarah yang selama ini telah dianggap mapan. Di satu sisi, Pendidikan sejarah memiliki peran advokatif melalui proses yang emansipatoris dan membebaskan. Untuk mewujudkan itu, Pendidikan sejarah tidak lagi terfokus pada urutan peristiwa, tapi bersinggungan dengan tema-tema baru yang kaya.

Menghadirkan tema yang kaya sekaligus menguatkan peran advokatif dan emansipatoris dalam pendidikan sejarah menjadi semakin mungkin dengan inkorporasi kajian pascakolonial. Pascakolonial terjadi sejak kekuatan besar (kolonialisme) dari luar dan mendominasi sehingga berdampak terhadap budaya dan masyarakat (Ashcroft et al., 2017). Kondisi ini membentuk arena sosiokultural yang didominasi kekuasaan asing dalam konteks atau lokalitas tertentu sehingga menimbulkan ketertindasan, ketertinggalan, serta ketergantungan sehingga berpengaruh terhadap konstruksi berpikir dan bertindak masyarakat. (Brett & Guyver, 2021)

Sebagai teori, pascakolonial adalah konsep dan kajian terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme dalam suatu konteks budaya. Teori pascakolonial berusaha menjelaskan isu-isu oposisi, hak istimewa, dominasi, perjuangan, perlawanan dan subversi serta kontradiksi dan ambiguitas. Isu-isu ini pada dasarnya terkait dengan kritik terhadap hubungan antara pengetahuan/kekuasaan dan pemahaman tentang bagaimana representasi dunia dalam kata-kata, ide, gambar, dan teks, keduanya menciptakan dan mencerminkan keyakinan dan menghasilkan tindakan. (Hickling-Hudson, 2011; Hickling-Hudson et al., 2003b)

Di bidang pendidikan, perspektif pascakolonial membahas imperialisme budaya dan warisannya dalam kurikulum sekolah dan asumsi Barat tentang pengetahuan dan dunia yang mendukungnya, sehingga mendorong perlunya kritik terhadap pedagogi dan transformasi

pendidikan. (Enslin, 2017) Hal ini telah mendorong beberapa sarjana untuk melihat pendidikan dalam perspektif pascakolonial, seperti Mc Laren (1995) yang menyunting *Postmodernism, post-colonialism and pedagogy*. Di dalamnya ia menulis mengenai *post-colonial pedagogy*. Kemudian ada pula kumpulan tulisan yang disunting oleh Hickling-Hudson et al. (2003a) bertajuk *Disrupting preconceptions: Postcolonialism and education*. Selain itu ada pula edisi khusus dari jurnal *Pedagogy, Culture & Society* yang membahas tentang pascakolonial (Rizvi et al., 2006). Sementara itu, dalam bidang Pendidikan sejarah, *Historical Encounters* menerbitkan edisi khusus tentang *Postcolonial History Education* (Brett & Guyver, 2021). Namun demikian, kajian pascakolonial dalam konteks pendidikan sejarah di Indonesia masih belum mendapat perhatian. Oleh karena itu, tulisan ini secara khusus bermaksud melihat bagaimana pendidikan sejarah Indonesia ditinjau dari perspektif pasca kolonialisme.

Sebagai suatu kajian, pascakolonial tidaklah terdiri atas satu gagasan pokok. Ada beragam pemikiran yang menopang dan memberikan perspektif baru dalam melihat realitas. Gagasan utama tentang pascakolonial diilhami oleh pemikiran Fanon yang melihat kolonialisme sebagai kekuatan destruktif dan dianggap sebagai praktik dehumanisasi yang dicapai melalui kekerasan fisik dan mental. Karenanya, perlawanan menjadi katarsis mental untuk mengembalikan derajat bangsa yang terjajah. (R. Setiawan, 2022, hal. 16) Pemikiran lain dalam melihat kolonialisme disampaikan oleh Edward Said yang melihat pelibatan kekuatan wacana dalam kolonialisme (Said, 1978). Sementara itu, Homi K. Bhabha berfokus pada kajian identitas sebagai alat perlawanan pascakolonial (Bhabha, 2012). Ada pula pemikiran Gayatri C. Spivak yang memfokuskan permasalahan pascakolonialisme pada *subalternitas* (Spivak, 1988).

Dari ragam pendekatan di atas, penulis tertarik dengan konsep mengenai *subalternitas* dalam pendidikan, khususnya pendidikan sejarah di Indonesia. Hal ini karena dalam historiografi Indonesia masih berkembang fenomena *people without history*. Fenomena ini menggambarkan bahwa ada narasi sejarah yang sengaja tidak dimunculkan, sehingga kisah-kisah masa lalu manusia tidak terekam. Apabila ada peristiwa sejarah yang ditutupi, berarti

akan menghilangkan identitas sekelompok orang akibat tidak diakuinya eksistensi mereka dalam narasi sejarah resmi. (Ahmad, 2016; Nordholt, 2004) Dalam pandangan Spivak, *people without history* dapat disandingkan dengan konsep *subaltern*.

Konsep subaltern menurut Gramsci mengacu pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tunduk pada hegemoni kelas penguasa. Kelas subaltern dapat mencakup petani, pekerja, dan kelompok lain yang tidak diberi akses ke kekuasaan hegemonik. (Ashcroft et al., 2017) Mengacu pada pemikiran Spivak (1988), subaltern merujuk pada siapa saja yang tidak memiliki kebebasan untuk bereksistensi. Artinya, siapa saja orang yang selalu terwakilkan oleh dominasi wacana kekuasaan terutama dalam konteks pascakolonial.

Subalternitas dalam pendidikan menjadi isu penting untuk menghadirkan peran pembelajaran sejarah yang emansipatoris. Inilah yang kemudian melahirkan buku suntingan Apple & Buras (2006) yang menjawab pertanyaan dari Spivak tentang “apakah *subaltern* dapat berbicara?” yang menyatakan bahwa *subaltern* dapatlah berbicara. Untuk itu, pembelajaran yang mampu menganalisis tentang bagaimana kekuasaan memainkan bahasa dan kebutuhan dari *subaltern* menjadi penting dilakukan. Pendidikan mestilah menghadirkan dialog antara guru dan siswa tentang bagaimana dan mengapa kelompok tertentu ditempatkan secara subaltern oleh media, oleh penguasa, dan oleh pemerintah. (Apple & Buras, 2006) Dengan ini, akan terbentuk kembali persepsi tentang subaltern dan bagaimana mereka dapat dan harus didengar.

Peluang memperdengarkan suara subaltern dalam pendidikan sejarah diperlukan untuk melawan kebisuan sejarah yang lahir dari represi kekuasaan yang hegemonik. Kebisuan sejarah terjadi ketika masa lalu tidak mendapatkan tempat di dalam historiografi, sehingga mengakibatkan kesenjangan pengetahuan tentang peristiwa di masa lalu. Akibatnya, kelompok *subaltern* berpotensi besar untuk menjadi *people without history*. Suara mereka tidak terdengar sehingga melahirkan kebisuan sejarah. Dalam sejarah Indonesia, sampai saat ini kelompok yang suaranya tidak terdengar masih saja ada, padahal mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud melihat secara kritis bagaimana

subaturnitas diposisikan dalam Pendidikan sejarah Indonesia sekaligus merumuskan gagasan inkorporasi sejarah *subaltern* dalam pendidikan sejarah Indonesia.

METODE

Pendekatan dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999).

Literatur *review* merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

Literature review dimulai dengan materi hasil penulisan yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian membaca abstrak, setiap jurnal terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam suatu jurnal. Mencatat poin-poin penting dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penulisan dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Darmadi, 2011 dalam Nursalam, 2016).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut (Kulthau, 2002) :

1. Pilih tema
2. Explorasi informasi

3. Penentuan arah penelitian
4. Mengumpulkan sumber data
5. Penyajian data
6. Menyusun laporan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya (Krippendoff, 1993). Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Subaltern History* dalam Kurikulum di Indonesia**

Narasi *subaltern* muncul pada tahun 1980-an dari studi sejarah di India. Kajian mengenai *subaltern* memberikan ruang bagi kelompok tertindas lainnya selain kelas pekerja, terutama kaum tani dan masyarakat pribumi dalam analisis politik mereka. Domain politik dibagi menjadi lingkungan elite dan *subaltern*, yang masing-masing berinteraksi tetapi tetap menjaga integritasnya (Pervaiz, 2017).

Gagasan dan perkembangan tentang poskolonial dan *subaltern* dalam kurikulum sejarah sudah dilakukan kajian salah satunya Afacan (2020) mengenai munculnya *subaltern* studi dalam kajian kurikulum. Fokus kajian Afacan mengenai kurikulum dalam pendidikan sejarah di India kurang memberikan tempat dalam kajian kelompok-kelompok yang kurang terpelajar dalam proses kemerdekaan India. Kajian ini berdasarkan pendekatan kaum *subalternis* terhadap sejarah India mengenai objektivitas sumber sejarah yang perlu dikritisi.

Dalam kurikulum di Indonesia, kajian mengenai *subaltern* dimulai dengan kritik terhadap historiografi elite, relasi kuasa, kolonialisme, dan posisi *ordinary people* dalam kurikulum. Hal ini dilakukan dalam upaya dekolonisasi terhadap historiografi yang telah berkembang saat ini. Kajian historiografi *subaltern* menjadi alternatif dalam mengembangkan kesadaran dekonstruktif dalam historiografi guna mendobrak kebekuan dan disorientasi historiografi Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan oleh

Jacques Derrida bahwa “semua teks harus selalu dipertanyakan kebenarannya”. Membaca teks secara kritis merupakan permulaan penemuan kebenaran sejarah. Dalam hal ini, karya historiografi yang ada juga harus dipandang sebagai teks yang harus diragukan kebenarannya dan kalau perlu dibongkar kembali. Dengan demikian penulisan kembali sejarah (*rewriting history*) merupakan suatu keniscayaan, bukan barang tabu yang dapat dipaksakan secara politis (Sulistiyono, 2026).

Salah satu contoh dalam historiografi Indonesia kajian mengenai *subaltern* dan *history from below* sudah dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo (1984) melalui karya “Pemberontakan Petani Banten 1888”. Karya monumental historiografi ini menempatkan masyarakat Indonesia khususnya para “*ordinary people*” menjadi subjek dalam peristiwa sejarah. Posisi kaum marginal ini ditujukan pada para petani di Banten khususnya di daerah Cilegon dan Serang yang berusaha memperjuangkan hak-haknya dalam melawan hegemoni kolonialisme saat itu. Dalam analisisnya, Sartono Kartodirdjo menempatkan peristiwa ini sebagai sebuah gerakan sosial *messianistik* atau *millenarisme* sebagai antitesis dari peran dan status sosial pemerintah residen di Banten.

Singgih T. Sulistiyono (2016) menggunakan konsep ini sebagai historiografi “pembebasan”. Historiografi pembebasan mengacu kepada karya sejarah yang bukan sekadar sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang, melainkan satu karya sejarah yang mampu membangkitkan kesadaran terhadap masalah aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Perpaduan antara kesadaran sejarah dan kesadaran aktual serta kesadaran futural itu pada gilirannya akan mendorong semangat masyarakat untuk melakukan suatu langkah perbaikan demi mencapai cita-cita Indonesia Baru sebagai komunitas bangsa yaitu masyarakat yang makmur, berkeadilan, mandiri, bebas dari penindasan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karenanya, diskursus *subaltern* sebagai historiografi pembebasan ini perlu diwacanakan menjadi sebuah bagian dalam kurikulum pendidikan sejarah di Indonesia. Sejalan dengan paradigma teori kritis dalam studi sosiologi, historiografi *subaltern* juga memiliki perhatian utama untuk membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos,

ketidaktahuan, dan manipulasi masa lampau yang menyebabkan kesalahan dalam memahami kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, historiografi pembebasan memiliki misi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi sehingga memberikan inspirasi untuk melakukan suatu perbaikan demi mencapai masa depan yang gemilang. Persoalan-persoalan aktual yang dapat dianalisis secara historis antara lain menyangkut kemiskinan, ketidakadilan, dominasi, eksploitasi, diskriminasi (ras, gender, kepercayaan, dan sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya. Hanya dengan penyadaran semacam itu, masyarakat Indonesia akan menyadari dan kemudian tergerak untuk melakukan *action*. Dengan demikian, sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre tersebut di atas, historiografi pembebasan juga dimaksudkan untuk ambil bagian dalam memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kemajuan, dan hak asasi manusia melalui misi penyadaran dengan tulisan sejarah.

Urgensi *Subaltern* dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

Historiografi *subaltern* memiliki perhatian utama untuk membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan, dan manipulasi masa lampau yang menyebabkan kesalahan dalam memahami kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Persoalan-persoalan aktual yang dapat dianalisis secara historis antara lain menyangkut kemiskinan, ketidakadilan, dominasi, eksploitasi, diskriminasi (ras, gender, kepercayaan, dan sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya. Hanya dengan penyadaran semacam itu, masyarakat Indonesia akan menyadari dan kemudian tergerak untuk melakukan *action*. Dengan demikian, historiografi *subaltern* juga dimaksudkan untuk ambil bagian dalam memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kemajuan, dan hak asasi manusia melalui misi penyadaran dengan tulisan sejarah.

Subaltern history memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mempresentasikan identitas mereka dalam membangun kesadaran sejarah. Salah satu upaya adalah internalisasi dalam pembelajaran sejarah di Sekolah. Dalam kajian buku teks, dapat dipahami pula sebagai bentuk wacana yaitu teks jika dilihat pada pendekatan yang

postmodernism. Materi yang dikembangkan dalam buku teks perlu dikaji secara pragmatis berdasarkan kepentingan peserta didik, sebagai contoh mengenai substansi materi dihubungkan dengan isu sosial kontemporer dan sejarah lokal. Hal ini sejalan dengan argumentasi pedagogi kritis (*critical pedagogy*) (Giroux, 1983, 2005), Literasi kritis (*critical literacy*) (Gregory and Cahill, 2009).

Pengembangan selanjutnya *subaltern* history dapat dilakukan melalui pembelajaran sejarah berbasis *controversial issue* dengan pedagogi kritis. Kochhar (2008) menyatakan bahwa hampir setiap hal yang kita ajarkan merupakan sesuatu yang kontroversial atau memiliki unsur di dalamnya. Semakin banyak menginterpretasikan masa sekarang dengan masa lalu, semakin besar pula kemungkinan kita menemukan isu-isu kontroversial. Dengan berkembangnya kajian *subaltern history* maka akan memunculkan interaksi antara guru dan peserta didik. Dialog yang terbangun oleh guru dan siswa dapat memunculkan pertanyaan yang bersifat emansipatoris di mana terfasilitasinya gagasan dan pendapat siswa sehingga dapat mendorong mereka untuk tahu (*to know*) mengenai fakta, benda fisik atau tokoh (*figure*) sebagai subjek. Hal inilah yang kemudian mendorong siswa melakukan analisis empiris dalam *process of knowing* (Supriatna, 2011).

Selanjutnya konstruksi pembelajaran sejarah yang berorientasi pada masalah-masalah sosial kontemporer yang dikembangkan dalam kajian *subaltern history* didasarkan atas beragam narasi (*multiple narratives*) atau sejumlah narasi kecil (*small narrative*) yang bisa dimasukkan dan dikembangkan dalam materi dan pembelajaran sejarah, termasuk pengalaman sosial siswa pada masa kini. Agar materi sejarah Indonesia lebih banyak berisi tentang dinamika, kisah, dan peran orang biasa (*ordinary people*) - yang selama ini menjadi korban dari *hegemonic groups* dalam relasi kuasa menurut pandangan postmodernism atau postcolonial sambil memasukkan kearifan lokal (*local genius*) termasuk pengalaman sosial pada siswa, maka diperlukan dekonstruksi - meminjam teorinya Derrida (dalam Sallis, 1987) dalam pemilihan dan pengembangan materi pembelajaran sejarah.

Praxis Subaltern melalui *Critical Pedagogy*

Sebagai pendekatan dalam pendidikan, *critical pedagogy* telah mulai muncul pada tahun 1960-an dan berkembang secara luas di Amerika Serikat sekitar 30 tahun yang lalu sebagai pendekatan pembelajaran yang menyediakan inovasi pembelajaran untuk pemberdayaan peserta didik. Pendekatan ini mulai dikenalkan oleh Paulo Freire dan beberapa teoretisi pendidikan lain yang berpengaruh terhadap pembelajaran dan aktivitas di akar rumput, dan banyak mengawali transformasi pendidikan yang bertujuan untuk menghubungkan antara teori dan praktik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (Ochoa & Lassalle, 2008, hlm. 2).

Peter McLaren menyatakan walau pemikiran ini tidak merepresentasikan satu gagasan yang tunggal dan homogen, terdapat satu tujuan yang sama dalam *critical pedagogy*. Tujuan tersebut adalah memberdayakan kaum tertindas dan mentransformasi ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat melalui media pendidikan (Nuryatno, 2011, hlm. 1–2). Transformasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemahaman terlebih dahulu terhadap konteks sosiopolitik dan melakukan demokratisasi dalam konteks yang lebih luas (Fischman & McLaren, 2005, hlm. 425). Dengan demikian, tidak ada lagi ketimpangan, karena cita-cita yang diinginkan adalah adanya kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, *critical pedagogy* dimaknai sebagai pendekatan dalam pendidikan yang menempatkan peserta didik untuk mampu menghadapi dominasi yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keterhubungan, kesepahaman, dan keterkaitan.

Dalam pendidikan sejarah, *critical pedagogy* sangatlah relevan untuk diterapkan. Relevansi *critical pedagogy* dalam pendidikan sejarah, khususnya pembelajaran sejarah disebabkan pula oleh adanya kesamaan-kesamaan pandangan di antara keduanya. Persamaan pertama, keduanya memandang bahwa ada keterkaitan antara pendidikan dengan politik, bahwa ada dalam pendidikan terdapat kepentingan-kepentingan politik, begitu pula sebaliknya bahwa dalam aktivitas politik terdapat muatan-muatan edukatif. Persamaan kedua adalah keduanya tidak dapat melepaskan diri dari konteks yang melingkupinya. Pendidikan sejarah maupun *critical pedagogy* memandang bahwa kondisi sekitar, baik kondisi politik, ekonomi,

sosial, dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan senantiasa mengaitkan antara realitas dengan konsep-konsep. Persamaan ketiga ditinjau dari tujuan yang dicapai, yakni terbangunnya kesadaran kritis dari peserta didik atau masyarakat dalam melihat realitas yang menjadikannya sebagai landasan dalam bertindak. Persamaan keempat adalah keduanya memiliki landasan yang sama, yakni keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan menjadi kata kunci yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat dan refleksi diri guna mencapai transformasi sosial. Oleh karena adanya persamaan-persamaan itu, *critical pedagogy* relevan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran sejarah dalam kelas.

Proses pendidikan sejarah dalam perspektif *critical pedagogy* terdiri atas tiga metode, yakni *naming*, *reflecting*, dan *acting* (Nuryatno, 2011, hlm. 10). Tahap *naming* adalah tahap mempertanyakan atau mempermasalahkan mengenai hakikat mengenai peristiwa sejarah. Tahap *reflecting* berarti proses penemuan sebab, dampak, kesinambungan dan keterhubungan dari sebuah permasalahan dengan masalah yang lain. Pada tahapan ini, pendidikan sejarah menekankan pentingnya memfasilitasi siswa untuk merefleksikan mengenai beragam peristiwa di masa lalu yang berhubungan dengan masa kini. (Supriatna, 2007, hlm. 12) Tahap ketiga adalah *acting*, yakni proses untuk menemukan alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini guru mempersilakan siswa untuk mengemukakan pendapat dan bertindak untuk saling menghargai perbedaan dalam upaya pemecahan masalah.

Dalam konteks pendidikan sejarah, pedagogi kritis sangat sesuai untuk mengatasi permasalahan kebisingan sejarah yang muncul dari subalternitas dalam sejarah. Di dalam sejarah kerap terdengar istilah *people without history*. Fenomena ini menggambarkan bahwa ada narasi sejarah yang sengaja tidak dimunculkan, sehingga kisah-kisah masa lalu manusia tidak terekam (Nordholt, 2004, hlm. 11). Karena suaranya yang hilang dan tidak didengar, mereka termasuk dalam subaltern. Suara mereka tidak terdengar sehingga melahirkan kebisingan sejarah. Dalam sejarah, subaltern belum dapat bersuara karena rujukan utama dalam historiografi berasal dari wacana resmi pemerintah. Di satu sisi aktor yang ditonjolkan masih berkuat pada elite, baik elite politik maupun elite militer. Suara subaltern belum diakomodasi dalam historiografi. Kalaupun ada, suara mereka tersisih oleh narasi besar yang didorong

secara masif oleh penguasa. Dengan demikian, kekuasaan yang hegemonik telah melakukan upaya pembentukan pengetahuan sejarah (*historical knowledge*) yang seragam. Inilah yang menyebabkan tidak adanya apresiasi terhadap tulisan dan pemikiran sejarah yang bersifat alternatif, serta memunculkan kecenderungan rekayasa sejarah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Bambang Purwanto (2001, hlm. 111) menjelaskan bahwa sejarah Indonesia ditetapkan sebagai hasil dari mesin sosial dan politik daripada hasil dari pihak akademisi.

SIMPULAN

Pada akhirnya, wacana subaltern dalam pembelajaran sejarah juga menjadi sebuah pendekatan alternatif dalam mengajarkan sejarah dengan sisi yang berbeda. Kurikulum yang berlaku saat ini, pembelajaran sejarah lebih banyak didominasi oleh kegiatan menghafal dan mengingat nama tokoh, nama peristiwa, dan tahun kejadian (*wrote learning*) mengenai kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) dalam narasi besar (*grand narrative*) sejarah nasional yang menekankan pada kejayaan masa lalu bangsa. Historiografi *subaltern* perlu diperkenalkan dengan metode yang lebih emansipatoris dengan menempatkan peserta didik untuk terlibat dalam proses dialog di kelas. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendekatan posmodern dalam pembelajaran di kelas. Dalam pandangan posmodern, proses dialogis mengenai materi pembelajaran (*knowledge*) sebagai sebuah proses yang bersifat *open-ended* dan *nondeterminist construction*. Narasi *Subaltern* mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam kurikulum sebagai bagian dari pengayaan (*enrichment*) di kelas. Isu Hak Asasi Manusia, Gender, Ras, masyarakat biasa (*ordinary people*), hingga masyarakat marginal menjadi subjek dan objek dalam sumber pembelajaran di kelas. Proses tersebut dilakukan dengan pendekatan pedagogi kritis oleh guru bersama peserta didiknya di kelas. Melalui dialog, disepakati bahwa dalam desain pembelajaran sejarah yang berorientasi pada narasi *subaltern* harus memasukkan pengalaman sosial siswa (termasuk masalah sosial kontemporer) sebagai bagian dari materi pembelajaran sejarah dan relevan dengan konstruksi relasi (topik, konsep, pertanyaan emansipatoris, dan masalah-masalah sosial kontemporer) yang dikembangkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afacan, Serhan. (2020). *Power and Autonomy: Subaltern Studies and the History of the Subaltern Groups*. Tarihyazımı : Journal of Historiography, Summer 2020, 2(1), ss. 1-12.
- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan* (1 ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Apple, M. W., & Buras, K. L. (Ed.). (2006). *The subaltern speak: Curriculum, power, and educational struggles*. Routledge.
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2017). *Post-colonial studies: The key concepts* (2nd ed.). Routledge.
- Bhabha, H. K. (2012). *The location of culture*. Routledge.
- Brett, Peter. (2021). *Postcolonial history education: Issues, tensions and opportunities*. Journal Historical Encounters Volume 8 Number 1.
- Brett, P., & Guyver, R. (2021). Postcolonial history education: Issues, tensions and opportunities. *Historical Encounters*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/10.52289/hej8.210>
- Cornbleth, C. (2017). Critical Theory(s). In M. M. Manfra & C. M. Bolick (Ed.), *The Wiley Handbook of Social Studies Research* (hal. 191–209). John Wiley & Sons.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 2.
- Fischman, G. E. (1998). Donkeys and superteachers: Popular education and structural adjustment in Latin-America. *International Journal of Education*, 44
- Giroux, H.A. (1983). 'Theories of Reproduction and resistance in the new sociology of education: A Critical Analysis', *Harvard Educational Review, A Journal* (53)
- Gregory, Ann. (2009). *Constructing Critical Literacy: Self-Reflexive Ways for Curriculum and Pedagogy*. University of Nottingham Centre for the Study of Social and Global Justice in Critical Literacy: Theories and Practices
- Hickling-Hudson, A., Matthews, J., & Woods, A. (Ed.). (2003a). *Disrupting preconceptions: Postcolonialism and education*. Post Pressed.
- Hickling-Hudson, A., Matthews, J., & Woods, A. (2003b). *Education, postcolonialism and disruptions*. In A. Hickling-Hudson, J. Matthews, & A. Woods (Ed.), *Disrupting Preconceptions: Postcolonialism and Education*. Post Pressed

- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Pustaka Jaya.
- Kochhar, S.K. 2008. *Teaching of History (Pembelajaran Sejarah)*. Jakarta : PT Grasindo.
- Krippendoff, Klaus. 1993. Analisis isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta : Citra Niaga Rajawali Press.
- Kulthau, C. C. 2002. *Teaching The Library Reseach USA* : Scarecrow Press Inc.
- Nordholt, H. S. (2004). *De-colonising Indonesian Historiography*.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Nursalam. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi.4*. Jakarta : Salemba Medika.
- Nuryatno, Agus M. 2011. Telaah Kritis terhadap Filsafat Pendidikan Paulo Freire. *Jurnal : Cakrawala Pendidikan*
- Ochoa, E. C. & Lassalle, Y. M. "Editor Introduction". *Radical History Review*. Vol. 2008, No 102, Fall 2008. Hlm.1-7. Dalam <http://www.dukeupress.edu/journals/>, diunduh 14 Nopember 2011.
- Pervaiz, Naila. (2017). *The Subaltern School of Historiography*. *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. XXXVIII, No. 2
- Purwanto, Bambang. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris*. Yogyakarta : Ombak.
- Rizvi, F., Lingard, B., & Lavia, J. (2006). Postcolonialism and education: Negotiating a contested terrain. *Pedagogy, Culture and Society*, 14(3), 249–262. <https://doi.org/10.1080/14681360600891852>.
- Sabarguna, B.S. 2005. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Said, E. (1978). *Orientalism: Western concepts of the Orient*. Pantheon
- Segall, A., Trofanenko, B. M., & Schmitt, A. J. (2018). Critical Theory and History Education. In S. A. Metzger & L. M. Harris (Ed.), *The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning* (hal. 283–309). <https://doi.org/10.1002/9781119100812.ch11>
- Sallis, J. Ed. (1987). *Deconstruction and Philosophy. The Texts of Jacques Derrida*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Spivak, Gayatri C. (2008). *Etika, Subaltern, dan Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta : Pararaton.
- Spivak, Gayatri C. (2021). *Dapatkah Subaltern Berbicara?*. Yogyakarta : Circa
- Sulistiyono, Singgih Tri. (2016). *Historiografi Pembebasan : Suatu Alternatif*. Jurnal Agastya Volume 6 No 1.
- Supriatna, Nana. (2007). *Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis*. Historia Utama Press, Bandung.